

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Toko Gunung Agung, Jakarta.*
- Ali, Zainuddin, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.*
- Habib, Adjie, 2006, Tanggung Jawab Notaris Notaris sebagai Pejabat Publik. Mandar Maju, Bandung.*
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Mandar Maju, Bandung.
- Irianto, Sulistyowati, 2009. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta.*
- M. Syamsudin, 2007, Operasional Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Nur Basuki Winarmo. 2008. Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.*
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta.*
- Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.*
- Satjipto, Raharjo, 2006, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.*
- Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Perdata, Alumni, Bandung.*
- Sjaifurrachman dan Habib Adje, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.*

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Tobing, G.H.S. Lumban , 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabatan Pembuat Akta Tanah.

<https://agenta08.wordpress.com/2009/01/24/beberapa-pengumpulan-data-teknik-pengamatan-wawancara-dan-angket/>